

# Posisi Auditing dalam Lembaga Pendidikan

Makalah

disusun sebagai bahan presentasi forum “*Peer Teaching* Calon Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya” untuk matakuliah Auditing Pendidikan di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.  
Meeting Room, FTK - 15 Mei 2017

Disusun oleh:  
**Sulanam, M.Pd.**



**Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Tahun 2017**

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
sulanam@uinsby.ac.id

**Kata kunci:** penjaminan mutu, evaluasi pendidikan, audit pendidikan, pengendalian mutu.

Mendiskusikan posisi auditing bagi lembaga pendidikan, tentu tidak bisa dilepaskan dari diskusi tentang mutu, penjaminan mutu, dan pengendalian mutu pendidikan. Kenapa demikian? Audit erat kaitannya dengan kegiatan komparasi antara standar yang ditetapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Standar-standar tersebut merupakan acuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Biasanya pemerintah telah menetapkan sejumlah standar yang harus dicapai, dan pada giliran berikutnya lembaga pendidikan dapat menetapkan

<sup>2</sup> Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dra. Mukhlisah AM, M.Pd dan Ali Mustofa, M.Pd atas masukan awal dalam penyusunan peta ide keseluruhan modul Auditing. Terimakasih juga kepada Dr Phil. Khoirun Niam atas masukannya pada bagian landasan hukum dan kebijakan auditing pendidikan di Indonesia. Terimakasih kepada Dr. Nur Fitriyatin Yamin, Dr. H. Ibnu Ansori, Dr. H. Moh. Thohir, dan Dr. Asep Saepul Hamdani atas waktu yang diluangkan bagi penulis di sela rapat mingguan kantor LPM. Terimakasih juga penulis sampaikan pada Faradillah Sulaiman, SE. Kantor Satuan Pemeriksa Intern atas berbagai bahan dan referensi auditing.

Standar ini kemudian dikenal sebagai baku mutu pendidikan, yang keberadaannya harus diikuti dan atau didetailkan lebih banyak lagi (secara kuantitas) dan lebih dalam atau tinggi lagi (secara kualitas). Mutu standar ini disusun sedemikian rupa dan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan. Secara internal lembaga pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan diharapkan dapat menterjemahkan secara baik dan melampaui dari apa yang telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah. Ketetapan-ketetapan terstandar yang disusun oleh penyelenggara pendidikan ini selanjutnya dijamin dengan cara menyusun standar-standar mutu, dan dikendalikan dengan cara dikontrol secara ketat agar mutu standar dapat dicapai.

### A. Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan

<sup>3</sup> J.P. Russell, ed., *The ASQ Auditing Handbook; Principles, Implementation, and Use*, 3rd ed. (Wisconsin: ASQ Quality Press, 2005).





a. Pasal 1 ayat 21 menyebutkan: Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan

c. Pasal 11 ayat 1 menyebutkan: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi

d. Pasal 35 ayat 3 menyebutkan: Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan

e. Pasal 50 ayat 2 menyebutkan: Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional

f. Pasal 51 ayat 2 menyebutkan: Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan

g. Pasal 57 ayat 1 menyebutkan: Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan



2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Dalam Undang-undang ini, penjaminan mutu secara spesifik dibahas dalam bab III. Bab ini terdiri dari: bagian kesatu tentang sistem penjaminan mutu yang berisi tiga pasal (51, 52, 53) dengan delapan ayat. Bagian kedua tentang standar pendidikan tinggi yang berisi satu (54) pasal dengan delapan ayat. Bagian ketiga tentang akreditasi yang berisi satu (55) pasal dengan delapan ayat. Bagian keempat tentang pangkalan data pendidikan tinggi berisi satu (56) pasal dengan empat ayat. Bagian kelima, yang merupakan bagian terakhir dari bab ini menjelaskan tentang lembaga layanan pendidikan tinggi berisi satu (57) pasal dengan empat ayat.

Secara spesifik kata pengendalian yang berhubungan dengan mutu muncul sebanyak dua kali yakni:

- a. Pasal 6 huruf (j) menyebutkan: pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi
- b. Pasal 52 ayat 2 menyebutkan: Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Secara spesifik kata pengendalian yang berhubungan dengan mutu dalam peraturan pemerintah ini sebut sebanyak:

- a. Pasal 4 ayat 1 huruf (e) menyebutkan: Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), Menteri memiliki tugas dan wewenang mengatur mengenai ... (e) mutu pendidikan Tinggi

<sup>12</sup> Pasal 14 juga menyebutkan hal yang sama, tetapi untuk pendidikan bidang profesi dan spesialis.



Dalam peraturan ini mutu disebut dan dirumuskan sebagai berikut:

- [illegible]











- e. Pasal 2 huruf (a) menyebutkan: PDDikti bertujuan mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi.
- f. Pasal 2 huruf (d) menyebutkan: PDDikti bertujuan menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem mutu internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi.
- g. Pasal 2 huruf (e) menyebutkan: PDDikti bertujuan

### C. Posisi Auditing dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Berdasarkan uraian diatas posisi penjaminan mutu pendidikan tinggi sungguh strategis. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal diatas, utamanya dalam pasal Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; (b) pelaksanaan







Audit eksternal merupakan audit yang dilakukan oleh pihak-pihak luar di luar lembaga tersebut berada. Audit eksternal berupaya melakukan penjaminan mutu secara terstandar berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang umumnya dimiliki oleh asosiasi-asosiasi atau lembaga mutu. Dalam dunia pendidikan audit eksternal (SPME) dilakukan melalui proses akreditasi baik yang diselenggarakan oleh Negara berupa lembaga BAN-PT maupun LAM-PT bagi perguruan tinggi dan oleh BAN-S/M bagi sekolah/madrasah.

Kesemua hal yang dilakukan melalui serangkaian proses audit ini semata-mata adalah untuk penjaminan mutu pendidikan. Agar kualitas pendidikan semakin baik dan sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Berikut adalah gambaran tentang hubungan antara SPMI, SPME dan SN Dikti.

[illegible]



**Gambar 2.** Keterhubungan SPMI, SPME, PDikti dengan SNDikti

Gambar diatas menjelaskan bahwa SPMI memiliki keterkaitan dan hubungan dengan SPME, keduanya sebagai penjamin mutu pendidikan tinggi harus mengacu pada SNDikti. Keduanya diandaikan sebagai gugus kendali mutu sehingga memiliki fungsi audit mutu bagi ketercapaian pelaksanaan SNDikti.

Adapun posisi PDDikti yang berada di bawah piramida terbalik diandaikan sebagai unit pandkalan data secara nasional yang keberadaannya menopang validitas audit mutu perguruan tinggi. Maknanya, PDDikti dapat dijadikan rujukan bagi proses auditing secara internal dan secara eksternal karena data-data yang ada didalamnya terintegrasi. Pada fakta lapangan, auditor dapat memanfaatkan pangkalan data ini untuk kegiatan komparasi auditing. Bagi pengambil kebijakan tingkat nasional, data yang ada di PDDikti juga berguna sebagai akselerasi mutu pendidikan tinggi secara nasional.

Ketiganya, baik SPMI, SPME, maupun PDDikti selanjutnya secara sinergis memantau pendidikan tinggi dalam pencapaian standar nasional. Lebih jelas lagi, gambaran mengenai keterkaitan SPMI, SPME, PDDikti dengan SNDikti dalam menjamin mutu pendidikan sebagaimana tampak pada gambar 3, berikut:





